

Konflik Masyarakat Pendatang dengan Masyarakat Lokal

(Studi Kasus: Masyarakat di Wamena Papua)

Amelia Ariesty, Cantika Bintang Aprilani Sinaga, Cendanis Sekar Ningrum

Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Jakarta

Amelariesty1@gmail.com

Diterima Redaksi: 06-07-2024 | Selesai Direvisi: 02-09-2024 | Diterbitkan Online: 16-09-2024

Abstract

Conflict is not simply a difference of opinion or goals, but a reflection of widespread inequalities in the distribution of power and authority among diverse groups in society. In Papua province in particular, social conflicts between indigenous and migrant communities have been highlighted, especially in densely populated areas such as Wamena. This research aims to investigate the root causes, dynamics, and implications of this conflict by adopting Ralf Dahrendorf's dialectical conflict theory as the main frame of analysis. The method used is a literature study that reviews previous research on the Wamena conflict. By exploring the literature and integrating data, this research seeks to provide an in-depth understanding of the role of inequality in triggering and prolonging the conflict. This research is expected to provide sustainable conflict resolution and reconciliation efforts in Wamena by considering the social, cultural, and political context. With this approach, the research results not only describe the conflict situation but also open space for understanding the social change that may occur through sustainable reconciliation efforts.

Keywords: *Migrant community conflict, Wamena community, Dialectical conflict.*

Abstrak

Konflik bukanlah sekadar perbedaan pendapat atau tujuan, tetapi refleksi dari ketidaksetaraan yang meluas dalam distribusi kekuasaan dan otoritas di antara berbagai kelompok masyarakat. Terkhusus provinsi Papua, konflik sosial antara masyarakat asli dan pendatang menjadi sorotan utama, terutama wilayah berpenduduk padat seperti Wamena. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki akar penyebab, dinamika, serta implikasi konflik ini dengan mengadopsi teori konflik dialektika Ralf Dahrendorf sebagai bingkai analisis utama. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan melakukan tinjauan pada penelitian-penelitian konflik Wamena terdahulu. Dengan menggali literatur dan mengintegrasikan data-data, penelitian ini berupaya memberikan pemahaman mendalam tentang peran ketidaksetaraan dalam memicu dan memperpanjang konflik tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan upaya penyelesaian konflik dan rekonsiliasi yang berkelanjutan di Wamena dengan memperhatikan konteks sosial, budaya, dan politik. Melalui pendekatan ini, hasil dari penelitian tidak hanya menggambarkan

situasi konflik, tetapi juga membuka ruang bagi pemahaman mengenai perubahan sosial yang mungkin terjadi melalui upaya rekonsiliasi berkelanjutan.

Kata Kunci: Konflik masyarakat pendatang, Masyarakat Wamena, Konflik Dialektika.

Pendahuluan

Secara umum, konflik merupakan keadaan dimana terdapat perbedaan pendapat, tujuan, atau kepentingan antara dua pihak atau lebih yang mengarah pada ketegangan dan pertentangan. Konflik berasal dari bahasa latin *configere* yang berarti saling memukul. Secara sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih (bisa juga kelompok) dimana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya. Konflik juga dapat diartikan sebagai hubungan antara dua pihak atau lebih (individu atau kelompok) yang memiliki tujuan atau kepentingan yang berbeda (Muspawi, 2014). Keberadaan konflik sering kali dianggap sebagai sesuatu yang negatif karena dapat menyebabkan ketidaknyamanan, keretakan hubungan, bahkan kekerasan. Namun, konflik juga dapat menjadi katalisator perubahan dan perkembangan jika dikelola dengan baik.

Secara umum, konflik muncul ketika terdapat ketidakcocokan antara harapan atau kebutuhan individu atau kelompok. Konflik memiliki beberapa karakteristik, seperti ketidaksetujuan yang nyata atau tersembunyi, perasaan marah atau frustrasi, dan interaksi yang mungkin menjadi agresif. Konflik dapat bersifat konstruktif atau destruktif, tergantung bagaimana pihak-pihak yang terlibat menanganinya. Konflik konstruktif adalah konflik yang dikelola dengan cara yang mengarah pada penyelesaian masalah dan peningkatan hubungan, sedangkan konflik destruktif cenderung memperburuk masalah dan merusak hubungan.

Konflik sosial adalah bentuk ketegangan atau pertentangan yang terjadi dalam masyarakat akibat perbedaan kepentingan, nilai, norma, atau status sosial antara individu atau kelompok (Irwandi dan Chotim, 2017). Konflik ini sering kali timbul ketika terdapat ketidakcocokan antara harapan dan realitas yang dihadapi oleh anggota masyarakat. Misalnya, perbedaan dalam akses terhadap sumber daya, kesempatan ekonomi, atau hak-hak sosial dapat memicu konflik sosial. Ketidakadilan dalam distribusi kekayaan atau kekuasaan juga sering menjadi sumber utama konflik. Sejalan dengan pemahaman Alabanness, konflik adalah keadaan masyarakat yang mengalami kerusakan keteraturan sosial, dimulai dari individu atau kelompok kontra dengan pendapat dan pihak lainnya, sehingga mendorong

terjadinya perubahan sikap, perilaku, dan tindakan atas dasar ketidaksetujuannya (Yosua, 2020).

Dalam konteks sosiologis, konflik sosial dianggap sebagai fenomena yang tidak dapat dihindari dan merupakan bagian dari dinamika sosial. Para sosiolog melihat konflik sosial sebagai sesuatu yang dapat mendorong perubahan sosial, karena konflik mengungkap ketegangan dan masalah-masalah dalam struktur masyarakat yang memerlukan solusi. Konflik sosial tidak selalu bersifat destruktif karena dalam beberapa kasus, konflik dapat menghasilkan perubahan positif dengan mendorong reformasi dan peningkatan dalam kebijakan publik. Namun, konflik sosial juga dapat membawa dampak negatif jika tidak dikelola dengan baik. Konflik yang berlarut-larut dan tidak terselesaikan bisa menyebabkan ketidakstabilan sosial, kekerasan, dan disintegrasi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang tepat agar konflik sosial dapat diubah dari ancaman menjadi kesempatan untuk memperkuat solidaritas dan keadilan sosial dalam masyarakat.

Ada berbagai konflik yang terjadi di Papua dan hampir seluruhnya berkaitan dengan kemanusiaan. Salah satu konflik sosial yang terjadi di masyarakat adalah konflik antara masyarakat Papua asli dengan masyarakat pendatang. Konflik horizontal yang terjadi antara masyarakat di Papua adalah saat tragedi Wamena tahun 2000. Peristiwa ini berkaitan erat dengan adanya kebijakan pemerintah terkait politik etis otonomi khusus Papua, sebagai jawaban atas tuntutan Papua merdeka. Dikutip dari Jubi.id, sebelum peristiwa 6 Oktober 2000 itu terjadi, hampir semua permukiman penduduk asli Papua, dari kota hingga ke pedalaman, mendirikan pos Satgas Papua Merdeka yang terjadi setelah Ketua Presidium Dewan Papua, Theys H. Eluay menyerukan seluruh warga Papua Barat mendirikan pos Satgas Papua Merdeka dan mengibarkan bendera Bintang Kejora. Kondisi ini kemudian menimbulkan ketegangan di antara masyarakat, khususnya masyarakat pendatang. Akibatnya, terjadilah bentrokan antara masyarakat dengan aparat keamanan yang menurunkan bendera bintang kejora tersebut. Bermula dari konflik dengan aparat, konflik ini kemudian berkembang menjadi konflik antara warga asli Papua dengan warga pendatang. Tentunya, kerugian besar-besaran dirasakan akibat kerusuhan ini, baik kerugian material, korban jiwa, bahkan sekitar 13 ribu orang mengungsi karena ketakutan. Selain kerugian-kerugian tersebut, bentrokan ini juga menimbulkan trauma yang mendalam, khususnya bagi masyarakat pendatang.

Konflik di Wamena kembali terjadi pada tanggal 23 September 2019. Pada tahun itu, terjadi kerusuhan besar-besaran yang dipicu oleh adanya kesalahpahaman yang melibatkan seorang guru. Salah seorang guru yang bukan orang asli Papua diyakini melontarkan

kata-kata rasis ke salah satu siswanya, kemudian menimbulkan gesekan di antara keduanya. Sebagai bentuk solidaritas, ratusan siswa SMA mogok sekolah dan turun ke jalan. Hasilnya, 4 (empat) orang siswa tewas dalam aksi penyampaian pendapat tersebut yang memicu kerusuhan besar terjadi, hal ini ditandai dengan dibakarnya kantor bupati dan sejumlah kantor pemerintah lainnya hingga kios-kios milik warga pendatang, tepatnya pada 29 September 2019. Tidak hanya itu, kericuhan ini juga memakan korban hingga hampir 100 orang. Sementara korban lainnya adalah 3 (tiga) orang warga sipil, 1 (satu) orang prajurit TNI, dan 4 (empat) orang warga Papua. Tragedi ini cukup membuka luka lama bagi para pendatang. Mereka mengakui memerlukan waktu kembali untuk pulih atas rasa trauma yang terjadi. Konflik antara masyarakat asli Papua dengan masyarakat pendatang tidak berhenti pada 2019 silam. Kerusuhan kembali pecah pada 23 Februari 2023 yang didasari atas kecurigaan masyarakat lokal terkait penculikan anak. Masyarakat lokal mencurigai salah seorang supir toko kelontong sebagai pelaku penculikan anak. Adanya kericuhan antara pengemudi mobil kelontong tersebut kemudian ditangani oleh aparat setempat dan TNI. Hasilnya, supir yang berasal dari Suku Batak tersebut tidak terbukti melakukan penculikan anak. Kerusuhan mengakibatkan 13 rumah dan beberapa toko di ruko terbakar. Selain itu, 14 warga mengalami luka-luka, 18 anggota TNI luka-luka, dan 10 orang tewas dalam kerusuhan ini.

Berdasarkan hal tersebut, maka rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah “bagaimana konflik antara masyarakat lokal dengan masyarakat pendatang yang terjadi di Wamena?” dan “bagaimana analisis konflik sosial tersebut dalam teori konflik Dahrendorf?”. Dengan demikian, penelitian ini akan membahas mengenai dinamika konflik yang terjadi antara masyarakat lokal dengan masyarakat pendatang di Papua. Kemudian, terjadinya konflik tersebut akan dianalisis menggunakan teori konflik Dahrendorf.

Metode Penelitian

Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif dapat digunakan untuk meneliti kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalisasi organisasi, gerakan sosial, atau hubungan kekerabatan. Selain itu, Creswell mendefinisikan pendidikan kualitatif sebagai suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Hasil dari penelitian dengan menggunakan metode kualitatif adalah deskriptif, dimana penguraian hasil diperoleh berdasarkan hasil analisis dalam penelitian. Penelitian ini menggunakan data sekunder dalam penulisannya. Pengumpulan data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui kajian literatur seperti kajian jurnal, buku, hasil

penelitian, situs web, artikel jurnal, ataupun catatan-catatan digital. Adapun, rujukan berdasarkan jurnal dan buku dapat dilihat dalam penjelasan berikut.

Terdapat penelitian terdahulu yang telah membahas tentang konflik antara masyarakat asli dan masyarakat pendatang di Wamena Papua. Penelitian dari Frans Kenny Chandra, Hubert Niklas, Muhammad Haikal, dan Shabila Ocktavia tahun 2022 dengan *Analisis Konflik HAM yang Terjadi di Papua* menggunakan metode penelitian kepustakaan melalui pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data pada penelitian, yaitu melakukan studi kepustakaan. Penelitian dari Frans Kenny Chandra, Hubert Niklas, Muhammad Haikal, dan Shabila Ocktavia akan membahas beberapa konflik yang terjadi Papua, salah satunya tragedi Wamena Oktober 2002. Pada penelitian tersebut akan membahas penyebab terjadinya konflik, kebijakan yang dilakukan pemerintah, serta dasar hukum HAM untuk melindungi masyarakat Papua. Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa terdapat persamaan dari metode penelitian hingga topik permasalahan yang akan dibahas oleh peneliti.

Penelitian dari Desi Mediawati yang berjudul *Konflik Antar Etnis Dan Upaya Penyelesaian Hukumnya* juga menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini membahas tentang konflik antar etnis Jawa dan etnis Lampung dan bagaimana penyelesaian konflik tersebut. Pada penelitian ini sama-sama membahas tentang konflik antara masyarakat pendatang dan masyarakat lokal, yaitu pada penelitian ini masyarakat pendatang adalah etnis Jawa. Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa terdapat persamaan dari mulai metode penelitian hingga topik permasalahan yang akan dibahas di jurnal oleh peneliti.

Berdasarkan konflik yang terjadi di Papua tersebut, peneliti ingin mencoba menganalisis konflik tersebut menggunakan teori konflik dialektika Ralf Dahrendorf. Secara umum, teori konflik adalah antitesis dari teori fungsionalisme yang melihat perkembangan dan perubahan sosial bersifat statis. Teori konflik menurut Dahrendorf menekankan pada dinamika kekuasaan dan otoritas dalam masyarakat. Menurutnya, kekuasaan dan otoritas adalah sumber yang langka dan selalu diperebutkan dalam sebuah ICA (Otoritas, Posisi dan Kepentingan) antara subordinasi dan superordinasi. Konflik terjadi karena ketidakseimbangan dalam distribusi kekuasaan dan otoritas antara kelompok-kelompok yang ada di masyarakat. Berdasarkan penjelasan teori Dahrendorf tersebut, konflik Wamena Papua dapat dianalisis dengan teori konflik dialektika Dandruff. Menurut peneliti, antara suku asli Papua dan pendatang, terdapat ketidakseimbangan kekuasaan yang akhirnya menimbulkan konflik. Adanya konflik horizontal antara masyarakat Wamena dengan masyarakat pendatang di Wamena yang belum selesai secara tuntas, membuat penulis ingin meneliti lebih jauh terkait konflik ini. Adanya konflik horizontal pertama pada tahun 2000, yang artinya 24 tahun

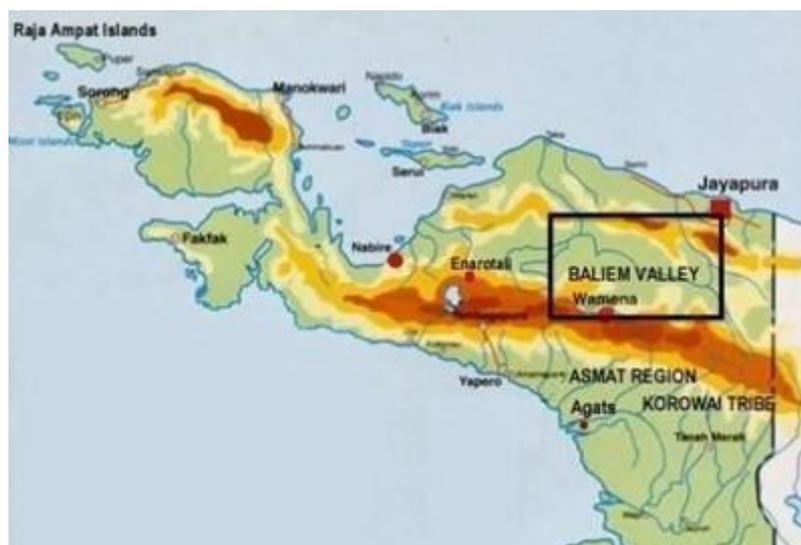
silam, ternyata masih dapat menjadi bara pada tahun 2023. Hal ini terbukti masih adanya ketegangan antara masyarakat asli dan masyarakat pendatang di Papua.

Pembahasan

Kondisi Sosial Masyarakat Kota Wamena

Wamena merupakan suatu distrik yang terletak di Provinsi Papua dan ibu kota kabupaten Jayawijaya. Distrik Wamena terletak di Papua bagian pegunungan yang menjadi pusat kota di tengah-tengah pedesaannya. Namun, beberapa kabar dari tahun belakangan, distrik ini menjadi Kabupaten dan membawahi sekitar 7 distrik yang tersebar di seluruh wilayah Lembah Baliem dan masih akan diperbanyak lagi. Wamena terletak di Lembah Baliem dengan ketinggian 1.650 meter di atas permukaan laut. Kondisi geografis Distrik Wamena cukup menantang, hal ini karena Wamena berada di sebuah lembah besar yang dikelilingi perbukitan. Menurut Hari Suroto, peneliti Balai Arkeologi Papua, asal-usul nama Wamena diambil dari bahasa asli suku di wilayah tersebut, yakni Suku Dani. Wamena dalam bahasa Suku Dani diartikan sebagai babi peliharaan. Nama ini berkaitan dengan peristiwa di masa lalu, saat seseorang asal Belanda menyalahartikan maksud kata 'Wamena' yang diteriaki oleh seorang gadis dan justru memaknainya sebagai nama dari daerah tersebut (Tempo.co, 2020). Ini merupakan akibat dari keterbatasan bahasa di antara keduanya yang padahal pada awalnya, daerah ini dikenal dengan sebutan Lembah Baliem, hal ini karena para penduduk terpusat di sebuah lembah yang sangat subur dan dialiri oleh Sungai Baliem.

Gambar 1. Peta Posisi Distrik Wamena di Provinsi Papua



Sumber: Kompasiana.com, 2019.

Distrik dengan wilayah seluas 110,85 km² itu memiliki total penduduk sedikitnya 41 ribu jiwa pada 2019 silam dengan jumlah penduduk pada tahun 2020 sekitar 41.844 jiwa, dan kepadatan penduduk 167,84 jiwa/km². Distrik Wamena menjadi distrik dengan jumlah penduduk terbanyak di Kabupaten Jayawijaya, tepatnya seperlima dari total penduduk Kabupaten Jayawijaya. Penduduk asli Wamena terdiri dari tiga suku, yakni Suku Dani, Suku Lali, dan Suku Yali, dengan suku yang paling mendominasi Distrik Wamena adalah Suku Dani.

Wamena sebagai ibu kota provinsi Jayawijaya memiliki fasilitas-fasilitas yang cukup lengkap dibandingkan daerah yang lainnya. Distrik ini terdapat Bandar Udara Wamena yang diresmikan sejak 2015 silam, bahkan Universitas Amal Ilmiah Yapis Wamena. Fasilitas umum di Wamena didominasi oleh pasar-pasar daerah, seperti Pasar Potikelek, Pasar Nayak, Pasar Jibama, Pasar Sinakma, dan Pasar Wouma, meskipun terdapat pula Aula Majelis Rakyat Papua (MRP). Fasilitas-fasilitas yang berkaitan dengan pemerintahan, seperti pengadilan agama, kantor bupati, gedung KUA, gedung KPU dan sejenisnya pada umumnya terletak di satu tempat yang berdekatan, hal ini tentunya untuk memudahkan akses masyarakat Wamena, mengingat posisi geografis Distrik Wamena yang berada di pegunungan dan dikelilingi perbukitan membuat akses transportasi cukup sulit. Namun, terdapat beberapa sarana transportasi umum di distrik ini, seperti taksi (dalam masyarakat Pulau Jawa sama seperti angkot), ojek roda dua, dan becak. Kondisi alam Wamena yang terletak di wilayah pegunungan ini juga memberikan tantangan tersendiri bagi masyarakatnya, terutama dalam hal pemenuhan kebutuhan atas barang-barang tertentu, bahkan tidak jarang pendistribusian barang harus dilakukan melalui jalur udara, yang membuat beberapa barang-barang cukup langka dan sulit, terlebih lagi jika barang tersebut tidak dihasilkan langsung oleh masyarakat Wamena. Hal ini berdampak pada biaya pendistribusian barang yang harganya cukup mahal.

Dalam hal mata pencaharian pada titik-titik tertentu, yakni pusat kota di Distrik Wamena, banyak ditemukan masyarakat pendatang. Mereka pada umumnya berprofesi sebagai abdi negara (TNI-POLRI), pekerja swasta, dan pedagang yang membuka usaha warung makan dan sejenisnya. Namun, kebanyakan dari mereka berprofesi sebagai tenaga pendidik yang mengajar di sekolah-sekolah maupun di perguruan tinggi di Kabupaten Jayawijaya. Sementara itu, penduduk asli Distrik Wamena lebih banyak bermata pencaharian bercocok tanam, berkebun, ladang, menernakkan hewan, dan hanya sedikit yang bekerja sebagai pegawai negeri. Hal ini berkaitan erat dengan pembagian kerja turun temurun di Wamena, yakni pekerjaan-pekerjaan tersebut dilakukan oleh wanita. Namun, sangat disayangkan bahwa pada faktanya, generasi muda di Wamena banyak sekali yang putus

sekolah dan menjadi ‘anak-anak terminal’, menjadi kuli angkut di pasar, hingga menjadi pemain judi dan togel, bahkan sebagian besar generasi muda di Wamena kecanduan minuman keras, narkoba, hingga lem aibon.

Wilayah Wamena yang terletak di pegunungan dan dikelilingi perbukitan memiliki keindahan tersendiri yang cocok dijadikan destinasi wisata. Distrik Wamena, khususnya daerah Lembah Baliem sering dijadikan wilayah objek wisata dan edukasi desa adat yang menjadi keunggulan sebagai objek wisata, khususnya dalam hal tradisi dan kesenian. Terdapat berbagai tradisi yang dapat dipelajari di Wamena, bahkan tepi-tepi kota Wamena didominasi oleh masyarakat Suku Dani yang merupakan suku besar di Papua. Sehingga, kehidupan-kehidupan masyarakat asli Papua tentunya sangat melekat di Suku Dani, seperti tarian suku dani, tradisi perang, hingga melihat mumi kepala suku dapat menjadi objek yang dapat disaksikan disini. Tidak hanya tradisinya, pemandangan indah yang disuguhkan di Lembah Baliem ini pun sangat menarik, khususnya bukit-bukit di sekitar lembah, keanehan pasir putih dan sumber air garam, goa terpanjang di dunia, bahkan berbagai flora-fauna yang tidak ada di tempat lain akan menjadi beberapa menu khusus yang hanya dapat diperoleh di Lembah Baliem Wamena.

Masyarakat Pendatang di Kota Wamena

Dilansir dari laman berita *Historia : Masa Lampau Selalu Aktual*, disebutkan bahwa pendatang memang sudah mendiami dan menghuni wilayah Papua sejak dahulu kala, bahkan sejak kendali Nusantara dibawah kepemimpinan Sriwijaya dan Majapahit. Data sensus penduduk Badan Pusat Statistik Papua menunjukkan proporsi suku asli Papua mencapai 83% dari total 700.00 penduduknya dan 17% sisanya berasal dari suku Jawa, Bugis, Minang, Madura, dan Batak. Meskipun tercatat hanya 17%, seorang pakar Australia mengungkap data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan bahwa Orang Asli Papua (OAP) telah menjadi minoritas di lima wilayah kabupaten/kota di provinsi Papua, seperti Merauke mencapai (62.73%), Nabire (52.46%), Mimika (57.49%), Keerom (58.68%) dan Jayapura (65.09%).

Walaupun demikian, masih terdapat 17 kabupaten lainnya yang didominasi oleh Orang Asli Papua (OAP), seperti Lanny Jaya 99.89%; Tolikara 99.04%; Yahukimo 98.57%; Paniai 97.58%, dan Jayawijaya 90.79% Papuan merupakan OAP, berarti Kabupaten Jayawijaya dihuni sedikitnya oleh 10% pendatang. Walaupun Kota Wamena yang termasuk dalam Kabupaten Jayawijaya hanya dihuni oleh 10% pendatang, tetapi fakta menunjukkan bentrokan di Wamena justru kerap terjadi antara masyarakat asli dengan masyarakat

pendatang dan mengindikasikan terdapat pengaruh dari para pendatang. Dalam laman tersebut, masyarakat pendatang cenderung menetap pada wilayah dataran mudah (sekitar pesisir), sementara daerah-daerah berkontur terjal, seperti pegunungan lebih banyak didominasi oleh Orang Asli Papua (OAP), kecuali wilayah pegunungan subur Lembah Baliem yang banyak lahan dibeli dari petani-petani tradisional. Penduduk non-Papua bergerak dan menempati wilayah yang kondusif bagi pembangunan industri dan pertanian searah dengan model ekonomi Indonesia.

Kedatangan masyarakat non-Papua tidak dapat terlepas dari pengaruh transmigrasi. Pada tahun 1977, setelah Papua ditunjuk sebagai tujuan prioritas transmigrasi, diperkirakan jumlah transmigrasi mencapai 70.000 hingga 150.000 pendatang. Bahkan, pemerintah Indonesia saat itu menargetkan jumlah pendatang di Papua dan Papua Barat sebesar 1,7 juta jiwa (Baihaqi, 2020). Dibandingkan dengan penduduk asli Papua pada kurun 1979-1989 berjumlah sekitar 1,2 juta jiwa. Kebijakan itu menyebabkan orang-orang Papua seakan menjadi minoritas di daerahnya sendiri. Meskipun periode program transmigrasi pemerintah berhenti, banyak terjadi transmigrasi spontan, yakni transmigrasi yang dilakukan sendiri oleh individu atas kemauan dan kesadaran individu. Banyak dari mereka datang dan bertahan hidup lewat jalur kekerabatan, yakni melalui saudara-saudara mereka yang telah lama bertransmigrasi ke Papua dan lambat laun populasi pendatang semakin meningkat.

Pada dasarnya, faktor terbesar yang melatarbelakangi maraknya pendatang di Papua adalah faktor ekonomi karena lebih mudah memanfaatkan kesempatan kerja dibandingkan dengan daerah asalnya. Hal ini karena di Papua, mereka dapat mendirikan berbagai macam jenis usaha rumahan yang tidak membutuhkan modal besar dan persaingan di wilayah ini tidak sebanyak di daerah asal mereka, seperti mendirikan warung rumah makan rumahan, tempat cukur rambut, atau toko kelontong. Selain itu, keuntungan yang diperoleh dari hasil berdagang di Papua juga jauh lebih menguntungkan sebesar dua hingga tiga kali lebih besar. Meskipun, tidak sedikit juga para pendatang adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberikan amanat untuk bertugas di Papua. Para pendatang yang berstatus sebagai perantau tersebut akan memulai hidup baru dan tinggal bersama teman, saudara, bahkan mengontrak. Namun secara perlahan, kepemilikan tanah akan mulai bergeser secara permanen melalui proses pembelian pada penduduk asli yang dijadikan tempat tinggal atau usaha, dan suasana ini menjadi bagian dari kehidupan antar orang Papua dan migran luar pada umumnya.

Dalam bertahan hidup, tidak semua masyarakat pendatang aktif sebagai pedagang dan rata-rata dari mereka berasal dari Sumatera Barat dan Pulau Jawa (BBC News, 2019). Umumnya, para pendatang dari Sumatera Barat berdagang kebutuhan-kebutuhan pokok,

termasuk beras, minyak, dan bahan pangan lainnya, sedangkan pedagang dari Pulau Jawa lebih banyak mendirikan warung-warung makan sederhana dan berdagang pakaian. Berbeda dengan kedua pendatang tersebut, pendatang dari Suku Bugis bermata pencaharian sebagai tukang ojek. Pada kasus kerusuhan 2019 yang mengakibatkan sejumlah ruko dan rumah pendatang hangus terbakar, diketahui ruko-ruko yang dibakar adalah ruko milik para pendatang dari Sumatera dan Jawa. Beberapa saksi mata yang turut menjadi korban menyampaikan, ketika kerusuhan terjadi, banyak Orang Asli Papua meneriakkan kalimat, “Jangan kasih mereka (pendatang) hidup di Wamena!”. Walaupun terlibat konflik pada 2019 silam dan kembali pecah pada 2023 lalu, kehidupan masyarakat pendatang dan asli Papua tidak selalu berkonflik.

Konflik Masyarakat Kota Wamena dan Masyarakat Pendatang

Terdapat berbagai konflik kemanusiaan yang terjadi di Papua antara masyarakat dengan pemerintah atau aparatur negara, bahkan masyarakat dengan masyarakat atau horizontal. Salah satu kasus yang cukup besar yang terjadi di Papua adalah tragedi Wamena atau biasa disebut tragedi berdarah Wamena yang terjadi sebanyak empat kali, yaitu pada tahun 2002, 2019, dan terakhir 2023. Selain ketiga peristiwa tersebut, terdapat berbagai peristiwa telah terjadi di Wamena dan menimbulkan banyak korban jiwa. Namun, ketiga peristiwa tersebut setidaknya hingga saat ini masih menjadi tragedi kemanusiaan yang sulit dilupakan masyarakat di sana.

Konflik-konflik yang terjadi di Wamena merupakan konflik horizontal atau konflik antara masyarakat pendatang dan masyarakat lokal yang berakar dari konflik pada Oktober 2000 berhubungan dengan kebijakan pemerintah untuk membuat kebijakan politik etnis Otonomi Khusus Papua sebagai jawaban atas tuntutan Papua Merdeka. Sebelum peristiwa 6 Oktober 2000, hampir semua pemukiman penduduk pribumi Papua dari kota sampai ke pedalaman mendirikan pos Satgas Papua Merdeka untuk mengibarkan bendera bintang Kejora. Saat itu, Eluay selaku ketua PDP membangun koordinasi politik dengan presiden Indonesia Gus Dur yang menyetujui perubahan nama Irian Jaya menjadi Papua dan mengizinkan pengibaran bendera Bintang Kejora. Perintah itu membuat semua masyarakat di Papua mengibarkan bendera Kejora di mana-mana termasuk masyarakat Wamena yang menimbulkan rasa semangat patriotisme dan nasionalisme Papua. Walaupun tidak memiliki pengaruh besar di dunia internasional, tetapi gerakan politik lokal tersebut berhasil menekan aparat keamanan dan militer kolonial Indonesia karena mengalami dilema antara mengikuti perintah Gus Dur atau menjalankan doktrin menjaga keutuhan NKRI di Papua Barat.

Akhirnya, terjadilah peristiwa 6 Oktober 2000 saat aparat keamanan menurunkan bendera Bintang Kejora di Wamena yang menimbulkan konflik horizontal antara warga asli Papua dengan warga pendatang. Dilansir dari laman Jubi.id (2024), menurut Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, sebanyak 37 orang menjadi korban jiwa, 80 orang terluka, 83 orang ditangkap serta sekitar 17 rumah dan 11 kios hangus terbakar, bahkan 13 ribuan orang mengungsi karena ketakutan akibat insiden tersebut. Peristiwa 6 Oktober 2000 merupakan salah satu tragedi kemanusiaan yang mengesankan serta sulit dilupakan dan hingga saat ini, kasusnya masih belum jelas.

Masih berusaha untuk sembuh dari trauma tragedi yang menelan banyak korban jiwa, pada tahun 2019, konflik kembali terjadi antara warga pendatang dengan warga asli di Wamena. Dilansir dari Detik.com (2023), tragedi disebabkan oleh perkataan yang diduga rasis dari seorang guru terhadap siswa asli Papua di Wamena. Senin, 23 September 2019, Sekelompok massa yang masih menggunakan seragam SMA melakukan aksi merusak dan membakar sejumlah bangunan, termasuk kantor bupati Wamena dan menyerang warga sekitar. Bahkan, peristiwa tersebut menyebabkan, 33 orang tewas. Akibat dari tragedi tersebut warga asli Papua dan warga pendatang dihantui perasaan ketakutan.

Tidak jauh dengan tragedi 2019, tragedi kembali terjadi pada tahun 2023 yang menewaskan 10 korban jiwa dan 14 orang luka-luka dari konflik antara masyarakat asli dan masyarakat pendatang. Tragedi ini muncul karena isu penculikan anak sekolah dasar yang berawal dari seorang anak ingin membeli kebutuhan di mobil *pick-up* yang dijadikan toko kelontong. Pedagang di mobil *pick-up* menyuruh anak tersebut untuk naik ke atas mobil, tetapi anak tersebut tidak mau dan lari. Masyarakat yang melihat kejadian tersebut menganggap bahwa pedagang ingin menculik anak tadi, lalu dua warga menghentikan mobil pedagang kelontong tersebut dan melaporkan kejadian itu kepada polisi. Saat sedang mengintrogasi, sekumpulan massa datang membuat kerusuhan dan menyerang aparat, lalu berujung pembakaran terhadap rumah warga yang mengakibatkan 33 orang warga pendatang terkena imbasnya dan tewas. Namun setelah diselidiki, berita penculikan tersebut adalah *hoax*. Sejak tragedi tahun 2000, 2019, hingga 2023, masyarakat Papua tidak berhenti merasa waspada, terutama masyarakat pendatang dan trauma yang berusaha untuk disembuhkan sering dirasakan. Tragedi 6 Oktober 2000 yang masih belum tuntas akan selalu menjadi ingatan warga Papua dan secara tidak langsung akan memupuk nasionalisme ganda orang Papua Barat.

Upaya Penyelesaian Konflik

Peristiwa Wamena merupakan salah satu dari sekian banyak peristiwa pelanggaran HAM yang terjadi di tanah Papua dan sampai saat ini masih belum terselesaikan yang setiap tahunnya, angka kekerasan Papua juga masih selalu muncul dan tidak mengalami penurunan signifikan. Namun, pemerintah maupun masyarakat harus ikut berkolaborasi untuk melakukan berbagai upaya dalam menyelesaikan atau mengurangi permasalahan yang ada di Papua. Untuk menyelesaikan konflik di Wamena secara inovatif dan aplikatif, diperlukan pendekatan yang tidak hanya berfokus pada mediasi tradisional, tetapi juga merangkul pendidikan dan kegiatan sosial yang memperkuat nilai-nilai kebhinekaan dan persatuan seperti dengan mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam kurikulum sekolah. Pendidikan formal yang berfokus pada gotong royong, toleransi terhadap perbedaan dapat memberikan pemahaman mendalam kepada generasi muda mengenai pentingnya hidup berdampingan secara damai. Selain itu, program pendidikan multikultural dapat dijalankan di sekolah-sekolah untuk mengenalkan siswa pada berbagai budaya yang ada di Papua, sehingga mereka tumbuh dengan kesadaran akan keragaman yang ada di sekitarnya. Di samping itu, kegiatan sosial dan budaya juga dapat menjadi alat efektif untuk mempererat hubungan antar masyarakat, misalnya membuat festival budaya bersama yang melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat lokal dan pendatang, seperti pertunjukkan seni tradisional, kuliner khas, dan pameran kerajinan tangan yang mencerminkan kekayaan budaya Papua. Dengan cara ini, masyarakat dari berbagai latar belakang bisa saling mengenal dan menghargai perbedaan. Selain itu, kegiatan membersihkan lingkungan atau memperbaiki fasilitas umum, dapat menjadi momen di mana masyarakat bekerja sama untuk kebaikan bersama, memperkuat solidaritas antar kelompok.

Selain itu, penguatan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam penegakan hukum juga sangat penting melalui kampanye kesadaran hukum dan hak asasi manusia yang dilakukan secara berkala bisa menjadi cara untuk memastikan bahwa semua pihak memahami pentingnya keadilan dan hukum yang adil. Pemerintah bisa bekerja sama dengan lembaga swadaya masyarakat lokal untuk mengadakan kampanye ini melalui media sosial, radio lokal, dan pertemuan komunitas. Pemberdayaan masyarakat juga tidak kalah penting dalam upaya penyelesaian konflik di Wamena, seperti program pelatihan keterampilan berbasis komunitas yang berfokus pada pemberdayaan pemuda dan perempuan dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Pemerintah dapat berkolaborasi dengan organisasi non-pemerintah untuk memberikan pelatihan kewirausahaan dan akses permodalan bagi masyarakat lokal dan pendatang. Pendekatan seperti ini dapat membangun fondasi kerja sama jangka panjang yang menekankan pentingnya pendidikan, kegiatan sosial, penegakan hukum

yang adil, dan pemberdayaan ekonomi sebagai kunci utama dan menyelesaikan konflik Wamena seutuhnya.

Analisis Konflik Masyarakat Wamena dengan Teori Konflik Dialektika Dahrendorf

Dalam konteks kasus konflik kemanusiaan di Wamena, Teori Konflik Dialektika Dahrendorf dapat memberikan pemahaman mendalam tentang dinamika konflik yang terjadi karena dalam teori ini, konflik muncul sebagai akibat dari ketidaksetaraan dalam distribusi kekuasaan di masyarakat. Konflik di Wamena tercermin melalui ketidaksetaraan ekonomi yang mencolok antara masyarakat pendatang dan masyarakat lokal. Wilayah ini kaya akan sumber daya alam, namun kontrol atas sumber daya tersebut cenderung dikendalikan pihak eksternal atau perusahaan besar, sedangkan masyarakat lokal sering tidak mendapatkan manfaat yang adil. Disparitas ekonomi ini menimbulkan ketegangan sosial dan memicu konflik horizontal.

Aspek politik juga memainkan peran penting dalam dinamika konflik di Wamena, dimana kontrol politik yang tidak merata, ketidakstabilan situasi politik, dan kurangnya representasi politik seringkali menciptakan ketidakpuasan dari berbagai kelompok masyarakat dan memicu konflik antar kelompok. Ketidaksetaraan dalam distribusi kekuasaan politik menjadi sumber utama konflik di wilayah ini, sesuai dengan pandangan Dahrendorf tentang konflik sebagai akibat dari ketidaksetaraan dalam distribusi kekuasaan. Selain itu, dimensi sosial juga memainkan peran penting dalam analisis konflik di Wamena karena ketidaksetaraan akses layanan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur sosial dapat menjadi pemicu ketegangan antar kelompok dalam masyarakat Wamena. Disparitas sosial ini menciptakan perasaan ketidakadilan dan menjadi pemicu konflik di tingkat lokal yang sesuai juga dengan konsep ketidaksetaraan struktural dalam Teori Konflik Dialektika Dahrendorf.

Perbedaan budaya antara masyarakat pendatang dan masyarakat lokal sering menjadi sumber ketegangan, saat suatu kebijakan tidak mempertimbangkan nilai-nilai dan kepentingan budaya lokal Wamena. Kurangnya pemahaman budaya lokal juga dapat memperburuk konflik yang sejalan dengan pemikiran Dahrendorf mengenai konflik sebagai hasil dari perbedaan kepentingan antara kelompok sosial. Dengan demikian, melalui lensa Teori Konflik Dialektika Dahrendorf, kita dapat memahami bahwa konflik kemanusiaan di Wamena adalah hasil dari ketidaksetaraan dalam distribusi kekuasaan politik, ekonomi, dan sosial di masyarakat. Adapun, konflik horizontal antara masyarakat pendatang dengan masyarakat lokal juga merupakan manifestasi dari ketidaksetaraan struktural yang ada. Untuk mengatasi konflik berkepanjangan ini, diperlukan upaya-upaya holistik untuk mengatasi akar

permasalahan dari ketidaksetaraan dalam distribusi kekuasaan dari berbagai bidang di masyarakat Wamena. Dalam penyelesaian konflik, terdapat beberapa fokus utama dari aspek yang diantaranya:

Pertama, adanya proses mediasi. Mediasi menjadi salah satu upaya yang paling mudah dilakukan untuk menengahi konflik antara masyarakat lokal dan masyarakat asli di Wamena. Mediasi dapat dilakukan dengan aparat kepolisian ataupun aparat berwenang lainnya yang dijadikan sebagai penengah. Tujuan utama dari mediasi ini adalah untuk menciptakan ruang bagi kedua kelompok untuk menyuarakan aspirasi dan keluhan mereka, sehingga tercipta pemahaman bersama. Dengan cara ini, kesepakatan yang adil dan berkelanjutan dapat dicapai dan memastikan integrasi harmonis terhadap masyarakat pendatang. *Kedua*, adanya dialog terbuka antara kedua kelompok. *Ketiga*, penguatan terhadap penegakkan hukum. *Keempat*, penguatan nilai-nilai Pancasila dan kebhinekaan. Penguatan nilai-nilai Pancasila dan kebhinekaan dapat diterapkan kepada para pelajar tingkat dasar dan menengah agar mendapatkan pemahaman mengenai persatuan dan kesatuan. Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa yang mengandung nilai-nilai luhur, seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial harus menjadi pedoman kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nilai-nilai ini berfungsi sebagai landasan moral dan etika yang mengarahkan setiap warga negara untuk hidup berdampingan secara damai dan saling menghormati. *Kelima*, penguatan terhadap berbagai aspek sosial dalam masyarakat.

Penutup

Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kondisi sosial masyarakat kota Wamena menunjukkan kompleksitas yang berkaitan dengan berbagai aspek, seperti geografis, demografis, ekonomi, dan politik. Wamena sebagai ibu kota Kabupaten Jayawijaya dengan ketinggian 1.650 meter di atas permukaan laut, sering menghadapi tantangan geografis secara signifikan karena terletak di lembah besar yang dikelilingi perbukitan. Suku asli Wamena, seperti Suku Dani, Suku Lali, dan Suku Yali, memiliki peran penting dalam dinamika sosial dan budaya di wilayah ini. Dari aspek demografi, Wamena memiliki populasi yang signifikan dengan total penduduk sekitar 41.844 jiwa pada tahun 2020. Namun, meskipun memiliki fasilitas dan infrastruktur lengkap, seperti Bandar Udara Wamena dan perguruan tinggi, Wamena masih menghadapi tantangan dalam distribusi kebutuhan dan aksesibilitas, terutama dalam pemenuhan kebutuhan barang-barang tertentu dan distribusi masih harus dilakukan melalui jalur udara yang berdampak pada tingginya biaya pendistribusian barang.

Konflik sosial antara masyarakat pendatang dan lokal yang mencapai puncaknya dalam tragedi berdarah pada tahun 2000, 2019, dan 2023, menyoroti ketidaksetaraan dalam distribusi kekuasaan politik, ekonomi, dan sosial. Konflik ini mencerminkan tantangan yang dihadapi dalam mencapai rekonsiliasi antar kelompok dan mengatasi ketegangan yang berakar dalam budaya, politik, dan ekonomi. Melalui analisis menggunakan Teori Konflik Dahrendorf, kita dapat memahami bahwa konflik di Wamena adalah hasil dari ketidaksetaraan struktural yang ada di masyarakat. Untuk mengatasi konflik ini, diperlukan upaya-upaya yang holistik dan berkelanjutan yang mengatasi akar masalah ketidaksetaraan dalam distribusi kekuasaan politik, ekonomi, dan sosial di Wamena. Salah satu langkah penting yang bisa dilakukan adalah memperkuat representasi politik masyarakat lokal dan memastikan partisipasi mereka dalam pengambilan keputusan karena akan memengaruhi kehidupan mereka. Selain itu, perlu dilakukan upaya konkret untuk meningkatkan aksesibilitas dan distribusi barang-barang ke daerah tersebut, sehingga masyarakat tidak lagi terisolasi dan terkucilkan dari dunia luar.

Akses dan kualitas pendidikan yang baik juga menjadi kunci dalam mengatasi konflik sosial di Wamena karena masyarakat akan lebih mampu untuk memahami perbedaan budaya dan menghargai keberagaman. Pendidikan juga dapat menjadi sarana untuk memperkuat kapasitas masyarakat dalam berpartisipasi dalam proses pembangunan dan pengambilan keputusan. Selain itu, perlu dilakukan upaya penguatan ekonomi masyarakat lokal melalui pembangunan infrastruktur ekonomi yang memadai, pelatihan keterampilan, dan pemberian modal usaha. Dengan memperkuat ekonomi masyarakat lokal, mereka akan lebih mandiri secara ekonomi dan memiliki kepentingan yang lebih besar dalam menjaga perdamaian dan stabilitas di wilayah mereka. Rekonsiliasi antar kelompok juga harus menjadi fokus utama dalam mengatasi konflik sosial di Wamena yang memerlukan sarana dialog terbuka dan sikap jujur antara masyarakat pendatang dan lokal, serta upaya untuk membangun saling pengertian, rasa hormat, dan kepercayaan di antara mereka. Pembangunan kepercayaan ini dapat dimulai melalui kerja sama dalam proyek-proyek pembangunan lokal yang melibatkan kedua belah pihak. Secara keseluruhan, penyelesaian konflik sosial Wamena memerlukan pendekatan komprehensif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan dan memperhatikan seluruh aspek secara menyeluruh karena hanya dengan mengatasi akar masalah ketidaksetaraan dalam distribusi kekuasaan dan membangun rekonsiliasi antar kelompok itulah, distrik Wamena dapat mencapai perdamaian dan kemakmuran berkelanjutan bagi seluruh masyarakatnya.

Untuk mengatasi konflik di Wamena, penulis menyarankan beberapa cara, yaitu dengan pendekatan holistik dan berkelanjutan yang berfokus pada penyelesaian akar masalah dari ketidaksetaraan pada aspek sosial masyarakat di Wamena. Pendekatan ini akan melibatkan semua pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, masyarakat lokal, dan masyarakat pendatang. Selain itu, dalam mengurangi konflik antara masyarakat lokal dan masyarakat pendatang, program pendidikan dan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman dan saling menghargai terhadap nilai budaya perlu digencarkan oleh pemerintah agar dapat mengurangi ketegangan budaya yang terjadi antara kedua elemen masyarakat Wamena tersebut.

Daftar Pustaka

- 18 Tahun Peristiwa Wamena Berdarah: Tuntaskan Kasus dan Hentikan Kekerasan di Papua.* (2021, April 4). Retrieved June 3, 2024, from KontraS: <https://kontras.org/2021/04/04/18-tahun-peristiwa-wamena-berdarah-tuntaskan-kasus-dan-hentikan-kekerasan-di-papua/>
- Amnesty desak investigasi serius atas kerusuhan di Wamena, 'dipicu' isu penculikan anak: 10 korban meninggal - 'tujuh tewas karena tembakan'.* (2023, February 24). Retrieved May 27, 2024, from BBC News: <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cw408q0wxv1o>
- Baihaqi, M. (2020). Kajian Awal tentang Peran Pendatang dalam Transformasi Konflik di Papua. *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, 7(2), 124-138.
- Chandra, F. K., Niklas, H., Haikal, M., & Ocktavia, S. (2022). Analisis Konflik HAM yang Terjadi di Papua. *Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humaniora*, 1(1), 62-77.
- Data BPS: Penduduk Asli Jadi Minoritas di 5 Wilayah Papua.* (n.d.). Retrieved May 27, 2024, from Satuan Harapan: <https://www.satuharapan.com/read-detail/read/data-bps-penduduk-asli-jadi-minoritas-di-5-wilayah-papua>
- Hidayat, M. R. (2019, October 11). *Wamena: Warga pendatang gerakkan ekonomi Papua tapi dikhawatirkan merampas hak politik.* Retrieved May 27, 2024, from BBC News: <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-50005910>
- Itlay, S. (2020, October 2). *Merawat Ingatan atas Tragedi Wamena 6 Oktober 2000.* Retrieved May 19, 2024, from Jubi.id: <https://arsip.jubi.id/merawat-ingatan-atas-tragedi-wamena-6-oktober-2000/>

- Kossay, M. (2019, August 13). *Mental Ketergantungan "Kondisi Wamena"*. Retrieved May 27, 2024, from Kompasiana: https://www.kompasiana.com/methodiuskossay/5d521ce90d823051af5f4802/mental-ketergantungan-kondisi-wamena?page=2&page_images=1
- Kusnandar, V. B. (2019, October 3). *Berapa Jumlah Penduduk Wamena?* Retrieved May 27, 2024, from Katadata Media Network: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/10/03/berapa-jumlah-penduduk-wamena>
- Martono, J. (2018, May 19). *Seputaran Kota Wamena dan Kampung Adat di Lembah Baliem*. Retrieved May 27, 2024, from Kompasiana.com: <https://www.kompasiana.com/jk.martono/5affbe1df1334463b6105743/seputaran-kota-wamena-dan-kampung-adat-di-lembah-baliem>
- Mediawati, D. (2019). Konflik Antar Etnis Dan Upaya Penyelesaian Hukumnya. *Khazanah Hukum, 1(1)*, 36-49.
- Murdiyanto, E. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif (Teori dan Aplikasi disertai Contoh Proposal)*. Yogyakarta: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat (LP2M) UPN "Veteran" Yogyakarta Press.
- Nama Wamena Papua Bermula dari Spontanitas: Kisah Gadis, Pria Belanda, Anak Babi*. (n.d.). Retrieved May 27, 2024, from Tempo.Co.: <https://travel.tempo.co/read/1413973/nama-wamena-papua-bermula-dari-spontanitas-kisah-gadis-pria-belanda-anak-babi>
- Pamungkas, M. F. (2019, October 10). *Mula Pendetang Mendiemi Papua*. Retrieved May 27, 2024, from Historia: Masa Lampau Selalu Aktual: <https://historia.id/kuno/articles/mula-pendetang-mendiemi-papua-Pelzx/page/1>
- Penyebab Kerusakan di Wamena yang Tewaskan 10 Orang*. (2023, February 25). Retrieved May 27, 2024, from detiknews: <https://news.detik.com/berita/d-6588475/penyebab-kerusakan-di-wamena-yang-tewaskan-10-orang>
- Rumopa, Y. (2020). Konflik lahan Bandara Melalan di Kampung Gemuhan Asa Kabupaten Kutai Barat. *Journal of Government Science (GovSci) : Jurnal Ilmu Pemerintahan, 1(1)*, 12-22.